

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI ADVOKASI HAKIM OLEH PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SUMATERA
BARAT**

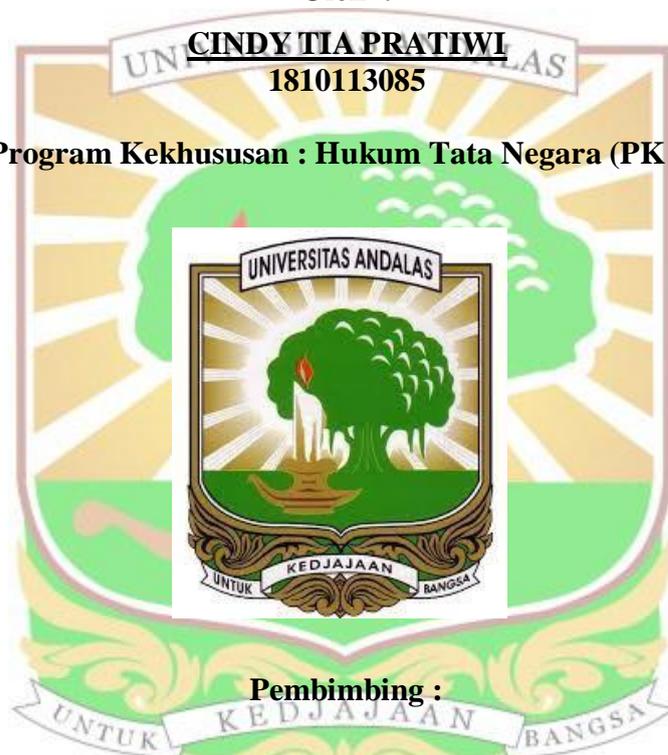
*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

CINDY TIA PRATIWI

1810113085

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing :

**Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg : 02/PK-V/IV/2025

**PELAKSANAAN FUNGSI ADVOKASI HAKIM OLEH
PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SUMATERA BARAT**

*(Cindy Tia Pratiwi, 1810113085, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas)*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di wilayah Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya menjaga independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan. Fungsi advokasi menjadi penting mengingat masih adanya tekanan, intimidasi, dan potensi kriminalisasi terhadap hakim yang dapat mengganggu proses peradilan yang objektif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Barat dan konsep ideal advokasi hakim serta pola kerja antara KY Republik Indonesia dengan Penghubung KY. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis data lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, advokat, dan lembaga bantuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aspek yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi advokasi dijalankan melalui dua pendekatan utama: preventif dan reaktif. Pendekatan preventif berupa pemantauan sidang dan edukasi, sedangkan pendekatan reaktif dilakukan melalui pendampingan dan koordinasi dalam kasus intimidasi atau intervensi terhadap hakim. Meskipun secara umum pelaksanaan fungsi advokasi telah berjalan efektif, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman masyarakat tentang peran KY, serta hambatan koordinasi administratif antara penghubung daerah dan pusat. Oleh karena itu, perlu di kalukan penguatan standar operasional prosedur advokasi di tingkat daerah agar fungsi advokasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.